

**PERAN UNIT PELAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN ANAK
NAGARI (UPT-KAN) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN TERPADU DAN GERAKAN MASYARAKAT PEDULI
KABUPATEN/KOTA SEJAHTERA
(PANDU GEMPITA) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI
KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



**ALFIANI
TM/NIM: 2012/1206029**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**PERAN UNIT PELAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN ANAKA
NAGARI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU DAN
GERAKAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA SEJAHTERA DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA PAYAKUMBUH**

Nama : Alfiani
TM/NIM : 2012/1206029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Agustus 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Drs. Suryanef, M.Si
NIP. 19640606 199103 1 006

Pembimbing II


Drs. Nurman S.M.Si
NIP. 19590409 198503 1002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

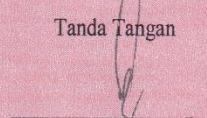
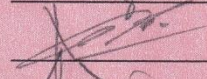
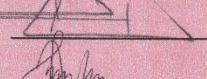
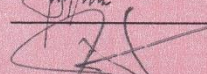

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 2 Agustus 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN)
Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Dan Gerakan Masyarakat Peduli
Kota/Kabupaten Sejahtera (Pandu Gempita) Dalam Menanggulangi
Kemiskinan Di Kota Payakumbuh**

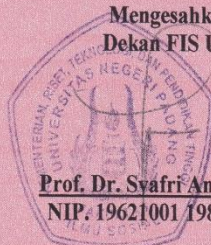
Nama : Alfiani
TM/NIM : 2012/1206029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Suryanef, M.Si	
Sekretaris	: Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota	: Dr. Akmal, M.Si	
Anggota	: Henni Muchtar, SH,M.Hum	
Anggota	: Dr. Hasrul, M.Si	

**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFIANI
Nim/Tahun Masuk : 1206029/2012
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota Payakumbuh adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Saya yang menyatakan



ALFIANI
NIM. 1206029

ABSTRAK

Alfiani, 2012/1206029 :Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Payakumbuh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) yang direalisasikan melalui UPT-KAN di Kota Payakumbuh. Pelayanan ini memberikan pelayanan sosial di bidang pendidikan, social, kesehatan dan pengembangan masyarakat secara terpadu dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota Payakumbuh.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data melalui cara pengumpulan data, klasifikasi data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota Payakumbuh melalui Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam memverifikasi data masyarakat yang tidak termasuk dalam data PPLS 2015. Masyarakat yang tidak masuk dalam data PPLS 2015 petugas UPT-KAN akan mensurvey ke lapangan untuk menetapkan keluarga itu miskin atau tidak sesuai dengan 14 kriteria atau minimal 9 kriteria yang sudah ditentukan terpenuhi yang telah ditentukan oleh BPS, Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pelayanan pendidikan. UPT-KAN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengikuti program yang telah ada di Dinas Pendidikan. Layanan yang dibutuhkan masyarakat umumnya Pemberian beasiswa miskin (BSM) kepada peserta didik tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) merekomendasikan pengaduan masyarakat khususnya di bidang pendidikan dengan pemberi bantuan. Dalam menyalurkan bantuan pelayanan pendidikan UPT-KAN bekerjasama dengan dunia usaha dan lembaga sosial yaitu lembaga sosial LKS Mitra Kenanga, LazizMu (Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah), BAZNAS.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Payakumbuh”**. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syofyan dan Ibunda Gusnelly yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.

3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, S. Pd., M. Pd selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial politik Fakultas Ilmu Sosoal Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Nurman S, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Henni Muchtar, SH., M. Hum, Bapak Dr. Hasrul, M. Si dan Bapak Dr. Akmal, SH., M.Si selaku Tim Pengujiyang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Alia Azmi, S.IP., M.Si, selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepustakaan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Teman-teman PPKn 2012 dan senior PPKn serta Junior yang telah banyak membantu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirulkalam, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, dan bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin.

Padang, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Kemiskinan	14
a. Pengertian Kemiskinan.....	14
b. Ciri-ciri Kemiskinan.....	15
c. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	15
2. Program Pandu Gempita.....	17
a. Dasar Hukum	17
b. Latar belakang adanya program Pandu Gempita.....	19
c. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	19
d. Jenis dan Skema Layanan Terpadu.....	20
e. Mekanisme Pandu Gempita.	20
B. Kerangka Konseptual	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Informan Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	27
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	32
a. Gambaran umum Kota Payakumbuh.....	32
b. Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli kota Sejahtera (Panduan Gempita)	39
c. UPT-KAN (Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan	
d. Anak Nagari)	42

B. Temuan Khusus.....	46
a. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam Memverifikasi Data Masyarakat yang tidak termasuk dalam Data PPLS 2015.....	46
b. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat pada Pelayanan Pendidikan	51
c. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Merekomendasikan Pengaduan Masyarakat Khususnya di Bidang Pendidikan dengan Pemberi Bantuan.....	60
C. Pembahasan	68
a. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam Memverifikasi Data Masyarakat yang tidak termasuk dalam Data PPLS 2015.....	68
b. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat pada Pelayanan Pendidikan	69
c. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Merekomendasikan Pengaduan Masyarakat Khususnya di Bidang Pendidikan dengan Pemberi Bantuan.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	23
2. Peta Kota Payakumbuh.....	36
3. Struktur Organisasi Pelayanan Pendidikan di Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT- KAN).....	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi Penduduk kota Payakumbuh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2012	37
2. Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013	38
3. Data Pengaduan Pelayanan Pendidikan di UPT-KAN di Survey ke Lapangan Bulan Juni-Agustus 2016.....	50
4. Data Pengaduan Pelayanan Pendidikan di UPT-KAN bulan Mei-Agustus 2015	58
5. Rekapitan Sumber dan Jenis Bantuan yang Diberikan Lembaga Sosial dan Dunia Usaha.....	63
6. Rekapitulasi Pengaduan, Mendapatkan Bantuan dan Bentuk Bantuan pada Pelayanan Pendidikan di UPT-KAN bulan April-September 2015.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	78
2. Daftar Informan	80
3. Dokumentasi.....	81
4. Surat Tugas.....	
5. Izin Penelitian.....	
6. Keterangan Penelitian.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, kehidupan masyarakat masih banyak yang tidak layak atau dalam taraf hidup kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu ekonomi yang serba kekurangan (Sunyoto Usman, 1998). Kementerian Sosial menyelenggarakan tempat pemberian pelayanan secara terpadu atau terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya melalui Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Kementerian Sosial menetapkan lima daerah menjadi proyek pecontohan penanganan masalah sosial melalui Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita) yakni Kota Payakumbuh Sumatera Barat, Sukabumi Jawa Barat, Sragen Jawa Tengah, Berau Kalimantan Timur dan Bantaeng Sulawesi Selatan. (www.kotapayakumbuh.go.id, diakses 12 Oktober 2015).

Terpilihnya Kota Payakumbuh dalam melaksanakan Pandu Gempita ini disebabkan oleh terpenuhinya kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial RI bagi Kota/Kabupaten pelaksana Pandu Gempita. Kriteria tersebut diantaranya:

- a) Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh:116.910 jiwa. Berarti masih kurang dari 1000.000 jiwa.
- b) Angka kemiskinan Kota Payakumbuh 8,44% tahun 2010 dan masih berkurang pada tahun 2011 menjadi 6,85%. Berarti masih kurang dari rata-rata nasional.
- c) Kota Payakumbuh Memiliki dinas/instansi sosial, yaitu Dinas Sosial dan Tenaga kerja.
- d) Pimpinan daerah atau Walikota Payakumbuh beserta jajaran kepala Dinas/instansinya berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan terpadu bagi masyarakat. Bahkan saat ini telah terbentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh no 05 Tahun 2011.
- e) Adanya kesediaan investasi dalam pengembangan layanan satu atap (one stop services). Saat ini telah dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh berdasarkan Perda No 05 Tahun 2011.
- f) Rata-rata PAD Kota Payakumbuh sebesar 17,22% di atas rata-rata PAD Provinsi Sumatera Barat.
- g) Kondisi sosial politik stabil

Di Kota Payakumbuh Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita) diresmikan oleh Kementerian Sosial pada tanggal 1 Mei 2013 dengan penandatanganan MoU antara Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Nomor :11/HUK/2013 dan 6/MOU/2013 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kota Sejahtera. Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita) diselenggarakan karena komitmen pimpinan daerah yang tinggi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesediaan investasi dalam pengembangan layanan satu atap. Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita) direalisasikan melalui Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) yang diresmikan pada tanggal 17 Desember 2013. Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari di Kota Payakumbuh (UPT-KAN) dikuatkan dengan diterbitkannya peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Aturan turunan dari peraturan Walikota tersebut berupa keputusan Walikota Nomor 460.3/349/WK-PYK/2014 tentang penunjukan personil Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) di Kota Payakumbuh dan nomor 460.5/369/WK-PYK/2014 tentang pembentukan tim penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggara program sosial terpadu Kota Payakumbuh.

UPT-KAN memberikan rekomendasi bagi masyarakat miskin yang membutuhkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pengembangan masyarakat kepada donatur pemberi bantuan. Masing-masing

bidang pelayanan dikelola oleh 2 orang petugas yang berasal dari instansi induk terkait, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Rekrutmen petugas pelaksana UPT-KAN berdasarkan usulan kepala SKPD yang bersangkutan. Diketahui bahwa personil pelaksana UPT-KAN Kota Payakumbuh berjumlah 13 orang. 11 orang berasal dari SKPD terkait, dan 2 orang berasal dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTIPEKSOS). Sebagai pelaksana UPT-KAN, mereka melaksanakan tugas sesuai tugas pokok masing-masing, dengan kata lain mereka ditempatkan dalam bidang layanan yang sama dengan tugas pokok di SKPD induknya. Misalnya, pelaksana dari bidang pendidikan akan ditempatkan di sub unit pendidikan. Dengan begitu, sebagai pelaksana UPT-KAN mereka sudah difungsikan dengan tugas pokok dari SKPD masing-masing. Meskipun sejumlah personil sudah difungsikan di bidang pelayanan sesuai dengan tugas SKPD induknya, namun tugasnya di UPT-KAN menjadi kurang fokus. Dilema inilah yang menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu. Pelaksana UPT-KAN yang berstatus PNS di sisi lain dituntut harus absen kehadiran dan memenuhi sasaran kinerja pegawai pada SKPD induknya. Sementara itu di sisi lain, mereka mendapat intensif tambahan di UPT-KAN dengan SK Walikota. Terkait dengan hal ini para petugas dari SKPD berharap adanya penugasan khusus dengan surat tugas yang jelas sehingga mereka melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini juga dikuatkan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Joko selaku Kabid Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Payakumbuh mengungkapkan bahwa:

“ Sejumlah personil sudah difungsikan di bidang pelayanan sesuai dengan tugas SKPD induknya, namun tugasnya di UPT-KAN menjadi kurang fokus. Inilah yang menjadi masalah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu. Pelaksana UPT-KAN yang berstatus PNS harus melaksanakan tugasnya di SKPD induknya. Sementara itu di sisi lain, mereka mendapat intensif tambahan di UPT-KAN dengan SK Walikota dan juga mempunyai tugas di UPT-KAN. terkadang di UPT-KAN ini kosong, apalagi disaat petugas melakukan survey ke lapangan, selain itu yang bekerja secara aktif hanya pekerja sosial tersebut, sedangkan petugas dari SKPD terkait lebih sering di kantornya masing masing. Karena inilah pengaduan masyarakat lambat diproses.” (Wawancara dilakukan tanggal 21 Juni 2016)

Dalam pelaksanaan, basis data yang digunakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) berasal dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2015. Dalam menentukan warga tersebut miskin Kota Payakumbuh menggunakan 14 indikator yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) namun jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin disebut miskin, diantaranya yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan kriteria tersebut maka sesuai dengan data Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh sebanyak 6.614 jiwa yang sudah terregistrasi oleh pemerintah pusat. Namun, masih ada keluarga miskin yang belum terregistrasi oleh data PPLS. Berdasarkan pengaduan masyarakat di UPT-KAN masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam data PPLS 2015 sebanyak 317 KK. Berarti data PPLS belum mampu menyaring semua masyarakat miskin yang ada di Kota Payakumbuh. Hal

inilah yang menyebabkan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Sedangkan dalam melaksanakan perannya UPT-KAN memberikan rekomendasi bagi masyarakat miskin yang membutuhkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pengembangan masyarakat. Proses awal semua pengaduan masyarakat diterima oleh petugas piket di UPT-KAN untuk dilakukan pencatatan, berbagai keluhan akan ditelaah sesuai dengan kategori permasalahan yang ditangani oleh SKPD terkait. SKPD memiliki wewenang untuk memverifikasi pengaduan yang masuk disesuaikan dengan program yang ada. Apabila program masih berjalan maka penanganan permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa segera ditindaklanjuti, tetapi bila program sudah melewati batas waktu dan tidak ada anggaran lagi maka penanganan masalah bisa diusulkan pada tahun anggaran berikutnya. Namun apabila SKPD terkait sulit memproses pengaduan yang telah direkomendasikan kepadanya, maka UPT-KAN selanjutnya akan mencari lembaga lain seperti Bank, Baznas, Lazizmu dan LKS Mitra Kenanga untuk memproses pengaduan yang telah direkomendasikan.

Dalam pemberian bantuan, UPT-KAN memperoleh bantuan dana dari perbankan, BAZNAS, Lazizmu, SKPD Terkait, dan LKS Mitra Kenanga. UPT-KAN ini hanya sebagai tempat pengaduan bagi masyarakat. Setelah pengaduan masyarakat diverifikasi oleh UPT-KAN, maka UPT-KAN akan merekomendasikan pengaduan masyarakat. Dalam memberikan bantuan UPT-KAN tidak memiliki sumber dana maka dari itu UPT-KAN ini bekerjasama dengan perbankan, BAZNAS, Lazizmu, SKPD Terkait, dan LKS Mitra Kenanga.

Sedangkan dalam pemenuhan sarana prasarana dan biaya operasional UPT-KAN dibebankan pada APBD Kota Payakumbuh anggaran Dinsosnaker. Dalam pelaksanaannya, UPT-KAN telah memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pengembangan masyarakat. Berdasarkan pengaduan masyarakat miskin ke UPT-KAN, jumlah pengaduan pada pelayanan pendidikan sebanyak 213 kk, pengaduan pada pelayanan sosial sebanyak 120 kk, pengaduan pada pelayanan kesehatan sebanyak 21 kk, dan pengaduan pada pelayanan pengembangan masyarakat sebanyak 4 kk. Namun yang mendapatkan bantuan pada pelayanan pendidikan 198 kk, pelayanan sosial sebanyak 105 kk, pelayanan kesehatan sebanyak 12 kk, sedangkan pelayanan pengembangan masyarakat belum mendapatkan bantuan. Jadi diketahui bahwa, pelayanan yang paling dominan diberikan pada pelayanan pendidikan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Rina Yulianty selaku pekerja sosial di UPT-KAN beliau mengatakan:

“pelayanan yang diberikan oleh UPT-KAN memang paling banyak pada pelayanan pendidikan. hal ini disebabkan pengaduan pada pelayanan pendidikan ini paling banyak di UPT-KAN sehingga bantuan yang disalurkan oleh UPT-KAN juga paling banyak di pelayanan pendidikan. selain itu UPT-KAN ini juga mempertimbangkan kalau setiap anak harus mengenyam pendidikan yang layak terutama bagi warga miskin yang memang sulit memenuhi kebutuhan anaknya dalam melanjutkan pendidikan selain itu selama kami melakukan observasi ke lapangan memang sarana dan prasarana sekolah anak anak tersebut tidak terpenuhi. Ada yang pergi sekolah bajunya sudah robek dan lusuh, ada yang tasnya sudah robek, sepatunya sudah tidak layak pakai serta alat tulis dan buku pelajaran pun tidak terbeli. Akibatnya anak malas belajar dan tidak berprestasi. Maka dari itulah kami memang dominan memberikan bantuan pada pelayanan pendidikan.(wawancara dilakukan 03 Agustus 2016)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Amril selaku petugas UPT-KAN

Pada pelayanan pendidikan. beliau mengatakan:

“dalam memberikan pelayanan UPT-KAN, memang dominan memberikan pelayanan pada pelayanan pendidikan. hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan pengaduan ke UPT-KAN, selain itu dalam memenuhi pendidikan anaknya di bangku sekolah, banyak orangtua anak miskin ini yang kesulitan. Kadang di saat mereka melakukan pengaduan ke UPT-KAN ini banyak yang mengatakan untuk makan sehari saja kami susah buk, apalagi untuk membayar buku dan uang sekolah anak. Selain itu banyak masyarakat miskin melakukan pengaduan ke UPT-KAN ini disebabkan oleh sulitnya mendapatkan uang untuk menyambung sekolah di jenjang pendidikan berikutnya.”(wawancara dilakukan tanggal 03 Agustus 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, dalam memberikan pelayanan UPT-KAN, memang dominan memberikan pelayanan pada pelayanan pendidikan. Hal ini disebabkan pengaduan pada pelayanan pendidikan ini paling banyak di UPT-KAN sehingga bantuan yang disalurkan oleh UPT-KAN juga paling banyak di pelayanan pendidikan. selain itu UPT-KAN ini juga mempertimbangkan kalau setiap anak harus mengenyam pendidikan yang layak terutama bagi warga miskin yang memang sulit memenuhi kebutuhan anaknya dalam melanjutkan pendidikan selain itu selama petugas UPT-KAN melakukan observasi ke lapangan memang sarana dan prasarana sekolah anak anak tersebut tidak terpenuhi. Ada yang pergi sekolah bajunya sudah robek dan lusuh, ada yang tasnya sudah robek, sepatunya sudah tidak layak pakai serta alat tulis dan buku pelajaran pun tidak terbeli. Akibatnya anak malas belajar dan tidak berprestasi. Maka dari itulah UPT-KAN memang dominan memberikan bantuan pada pelayanan pendidikan.

Dengan adanya Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) yang direalisasikan melalui UPT-KAN di Kota Payakumbuh ini dapat memberikan pelayanan sosial secara terpadu

baik dalam pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Serta melalui UPT-KAN di Payakumbuh, ditargetkan akan menjadi acuan bagi kota/kabupaten lainnya khususnya di Sumatera Barat. dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota Payakumbuh.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a) Masih banyak masyarakat Kota Payakumbuh yang belum terdaftar sebagai warga miskin dalam data PPLS 2015 di Kota Payakumbuh.
- b) Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota Payakumbuh belum berdampak secara signifikan.
- c) Layanan yang diberikan lebih dominan pada pendidikan
- d) Petugas dari UPT-KAN masih kurang melaksanakan tugasnya secara optimal
- e) UPT-KAN masih sedikit memperoleh donasi yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pada pelayanan pendidikan

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus mengingat banyaknya pelayanan yang diberikan oleh UPT-KAN Kepada masyarakat miskin, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota Payakumbuh terfokus pada pelayanan pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam memverifikasi data masyarakat yang tidak termasuk dalam data PPLS 2015 pada pelayanan pendidikan?
- b. Bagaimanakah peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pendidikan?
- c. Bagaimanakah peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) merekomendasikan pengaduan masyarakat dengan pemberi bantuan pada pelayanan pendidikan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota Payakumbuh terfokus pada pelayanan pendidikan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat diajukan sebagai wacana ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota Payakumbuh terfokus pada pelayanan pendidikan.

b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memberikan pelayanan sosial di Kota Payakumbuh

Penelitian ini bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memberikan pelayanan sosial dan UPT-KAN Kota Payakumbuh, untuk memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Payakumbuh.

c. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan pemahaman tentang Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Payakumbuh serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan di UPT-KAN Kota Payakumbuh tentang Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota Payakumbuh .yaitu :

- a. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam memverifikasi data masyarakat yang tidak termasuk dalam data PPLS 2015. Masyarakat yang tidak masuk dalam data PPLS 2015 tetap bisa mendapatkan pelayanan di UPT-KAN. petugas UPT-KAN akan mensurvey ke lapangan untuk menetapkan keluarga itu miskin atau tidak sesuai dengan 14 kriteria atau minimal 9 kriteria yang sudah ditentukan terpenuhi yang telah ditentukan oleh BPS. Namun terkadang masyarakat yang mengadu banyak juga yang tidak termasuk dalam kriteria penduduk miskin. Akibatnya pengaduan yang mereka lakukan tidak diproses oleh UPT-KAN. selain itu masyarakat yang melakukan pengaduan ke UPT-KAN juga ada orang yang sama, mereka ingin mendapatkan bantuan lagi. Padahal dalam melakukan pengaduan ke UPT-KAN tidak boleh berulang-ulang, karena masyarakat miskin yang membutuhkan juga banyak.

- b. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pelayanan pendidikan. UPT-KAN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengikuti program yang telah ada di Dinas Pendidikan. Layanan yang dibutuhkan masyarakat umumnya Pemberian beasiswa miskin (BSM) kepada peserta didik tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, UPT-KAN akan berusaha membantu merekomendasikan agar mendapatkan bantuan pendidikan kepada donatur yang ingin membantu . namun masih ada pengaduan yang tidak mendapatkan bantuan, disebabkan karena dalam melakukan pengaduan ke UPT-KAN masih ada masyarakat yang kurang melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akibatnya data yang kurang lengkap tersebut tidak diverifikasi atau petugas UPT-KAN menyuruh mereka untuk melengkapinya. Kadang ada juga pengaduannya sudah berulang ulang atau orang tersebut ingin mendapatkan bantuan double dan ada juga yang tidak termasuk kriteria miskin. Serta lamanya pengaduan masyarakat di proses di UPT-KAN karena terkadang kantor UPT-KAN kosong karena ada yang mensurvey ke lapangan sedangkan petugas yang lain bertugas pula di SKPD masing masing sehingga pelayanan kepada masyarakat itu berjalan dengan lambat
- c. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) merekomendasikan pengaduan masyarakat khususnya di bidang pendidikan dengan pemberi bantuan. Dalam menyalurkan bantuan pelayanan pendidikan UPT-KAN bekerjasama dengan dunia usaha dan lembaga sosial

yaitu lembaga sosial LKS Mitra Kenanga, LazizMu (Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah), BAZNAS. Sedangkan dari masyarakat penerima bantuan pendidikan ini memang menggunakan bantuan pendidikan yang diberikan oleh UPT-KAN memang untuk pendidikan. sehingga tujuan dari UPT-KAN memberikan pelayanan pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin yang telah melakukan pengaduan ke UPT-KAN. Sehingga tujuan dari UPT-KAN memberikan pelayanan pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin yang telah melakukan pengaduan ke UPT-KAN.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan Pelaksanaan program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota Payakumbuh, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota Payakumbuh, Hendaknya petugas dari UPT-KAN terutama yang berasal dari SKPD terkait harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga masyarakat yang melakukan pengaduan di UPT-KAN mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

2. Hendaknya petugas UPT-KAN mampu menghimpun donatur yang banyak agar pengaduan masyarakat bisa diproses dengan baik.
3. Kepada masyarakat, hendaknya masyarakat yang melakukan pengaduan di UPT-KAN harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengaduan di UPT-KAN. Dengan begitu petugas UPT-KAN dapat memproses pengaduan masyarakat dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amar, Syamsul. 2012. *Ekonomi Dalam Perspektif Kelembagaan*. Padang: UNP Press
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Iskandar.2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta : Gaung Persada Press
- Izza, Mafruhah. 2009. *Multi Dimensi Kemiskinan*. Surakarta: SebelasMaret University Press.
- Kementerian Sosial RI. 2013. *Keputusan Menteri Sosial RI No.50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera*. Jakarta Pusat: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial RI. 2014. *Pengembangan Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita)*. Yogyakarta: Balai besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS PRESS)
- Muslim, Kasim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia & Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedia Global.
- Sunyoto, Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta